

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan politik etis dengan semboyannya *Bervoederling van Welvaart* (memajukan kesejahteraan).¹ Kebijakan ini diambil pemerintah untuk membantu perbaikan kondisi ekonomi pribumi yang mengalami kemunduran pada masa sebelumnya. Kebijakan politik etis bertumpu pada tiga perbaikan utama yaitu: pemberian pendidikan, perbaikan irigasi dan melaksanakan transmigrasi.² Berangkat dari semangat politik etis inilah, terbentuk badan-badan berupa pelayanan kredit rakyat, rumah gadai pemerintah, pelayanan informasi (pos, telegraf dan telepon), kereta api negara, sekolah pemerintah, pelayanan kesehatan dan peningkatan pertanian.³ Lembaga perkreditan dibentuk guna memenuhi kebutuhan kelangkaan uang dan ketidakmerataan modal di masyarakat pada masa itu.

Menjelang tahun 1900-an, kebutuhan terhadap uang dirasakan semakin meningkat dari seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pelosok

¹ Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 35.

² Politik etis digagas Van Kol, van Deventer, Dr. Kuiper dan Idenburg yang sekaligus menjadi anggota dari Dewan Rakyat dan Panitia Peneliti Kemerosotan Kesejahteraan (*Mindere Welvaarts Commissie*) yang dibentuk pada 15 Oktober 1902. Panitia ini diketuai oleh Residen Pekalongan yaitu H.E. Steinmetz. Lihat Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia dari Hutang Kehormatan sampai Banting Stir* (Jakarta: Deperindag, 1996), hlm. 8.

³ Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 36.

desa. Hal tersebut terjadi karena barang kebutuhan tidak lagi dapat dipenuhi sendiri (harus membeli) dan munculnya kebutuhan yang semakin beragam dalam masyarakat Hindia Belanda seperti: limun, es, sepeda, cermin, jam dan lainnya.⁴ Kebijakan pemerintah kolonial yang menggantikan pajak tenaga atau bekerja tanpa bayaran (*heerendiensten*) dengan pajak uang per kepala (*hoofd geld*) juga membuat banyak penduduk semakin tidak bisa lepas dari penggunaan uang.⁵

Meningkatnya kebutuhan di masyarakat memunculkan kebutuhan untuk mendapatkan uang sebagai alat tukar barang. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak pemilik modal untuk melipatgandakan modalnya dengan cara praktik rentenir. Kaum pribumi yang umumnya bekerja sebagai petani menjadi objek yang rentan terjerat masalah utang-piutang dengan rentenir.⁶ Menjamurnya rentenir di banyak pedesaan di Jawa, membuat para petani yang terjerat hutang seringkali kehilangan sawah yang merupakan pangkal mata pencariannya dan turun derajat menjadi petani penggarap.⁷

Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh rentenir di pedesaan di Jawa tersebut, memunculkan ide untuk membentuk bank pemberi pinjaman kepada pribumi yaitu Bank Bantuan, Simpanan dan Kredit Pertanian Purwokerto (*Poerwokerto Hulp-, Spaar en Landbouwcredietbank*) oleh W.P.D de Wolff van Wosterode di Purwokerto. Bank yang didirikan pada tahun 1897 di Purwokerto

⁴ Pandu Suharto, *Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta: LPPI, 1988), hlm. 9-11.

⁵ *Ibid.*, hlm.13.

⁶ *Ibid.*, hlm.18.

⁷ Jan Bremen, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm.1-50.

ini termasuk dalam Bank Rakyat (*Volksbank*). Bank ini menggantikan bank yang telah dibentuk sebelumnya yaitu Bank Priyayi (*Hulp en Spaarbank voor Inlandsche Berstuur Ambtenaren*) oleh R. Bei Wirjaatmadja pada tahun 1895 di Purwokerto.⁸ Bank Bantuan, Simpanan dan Kredit Pertanian ini dibentuk untuk memberikan pinjaman kepada petani khususnya memberi kredit pertanian. Bank ini dilandasi semangat dan cita-cita de Wolff yang ingin membentuk lembaga perkreditan dengan prinsip koperasi.⁹ Bentuk *Volkscredietbank* di Purwokerto ini, kemudian cepat tersebar di daerah-daerah lain termasuk di Jombang dan Lamongan yang berada di Jawa Timur.

Munculnya bank kredit rakyat di Jombang merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Di tengah kondisi dan situasi masyarakat Jombang juga mengalami proses monetisasi, banyak masyarakat berada dalam kemiskinan. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Jombang hidup sebagai petani yang bergantung dari hasil pertanian. Pada 1865, penghasilan rata-rata petani kopi di distrik Mojoagung adalah f6,55.¹⁰ Penghasilan petani di Jombang dari uang sewa tanahnya yang disewakan kepada pengusaha swasta ternyata hanya cukup untuk membayar pajak tanah, tanpa bisa dibuat untuk keperluan lainnya.¹¹ Ketika penghasilan dari bertani tidak mencukupi untuk biaya

⁸ Bentuk *volksbank* memberikan kredit tidak hanya di kalangan pegawai pemerintah seperti pada Bank Priyayi tetapi juga penduduk pribumi secara umum. Pandu Suharto, *op. cit.*, hlm.27-33

⁹ Prinsip koperasi milik Friedrich Wilhelm Raiffeisen yang menerapkan Koperasi di Jerman pada tahun 1948. *Ibid.*, hlm.34.

¹⁰ Simbol f (Florin) adalah simbol mata uang pada masa kolonial yaitu Gulden. Nasution, *Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial (1830-1930)*, (Surabaya: Intelektual, 2006), hlm.66.

¹¹ *Ibid.*, hlm.114.

hidup, menjadi modal untuk masa tanam dan membayar pajak, maka petani cenderung terjerat hutang pada rentenir dengan bunga yang tinggi. Pendirian Bank Kredit Rakyat Jombang sebagai lembaga pemberi pinjaman uang kepada petani dengan bunga yang wajar, diharapkan agar petani tidak mengalami proses pemiskinan dan kehilangan tanahnya.¹²

Pada tahun 1902, Bank kredit yang dibentuk di Jombang diberi nama Bank Bantuan, Tabungan dan Kredit Pertanian Jombang (*Djombangsche Hulp-, Spaar- en Landbouwcredietbank*).¹³ Pada tahun itu, daerah Jombang masih menjadi distrik dari *afdeeling* Mojokerto yang dipimpin oleh Bupati Raden Adipati Arya Kromodjojoadinegoro.¹⁴ Bank Kredit Rakyat Jombang menjadi bank kredit yang pertama di Karesidenan Surabaya.

Bank perkreditan yang didirikan di Jombang berfungsi untuk memberikan pinjaman uang untuk kebutuhan modal (kredit pertanian).¹⁵ Hal itu disebabkan banyak petani menghabiskan uang di masa panen sehingga tak memiliki uang yang cukup pada masa tanam dan masa menunggu panen. Bank ini juga bertujuan untuk mengurangi peranan pelepas uang (*rentenir, cina mindering, woeker, rente*)

¹² “Djombang Hulp- Spaar en Landbouwcredietbank” dalam *Systematisch Overzicht der Verrigtingen en Bevindingen Het Landbouw Crediet voor Inlander Ingevolgen Gouvernemen Besluit van 8 Nov. 1900 no. 25 loopende rot ultimo 1903*, (Batavia, Landdrukkerij, 1904), No. katalog HB.7/2005. Landbouw. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. hlm. 79

¹³ Dalam skripsi ini, penulis mempergunakan nama Bank Kredit Rakyat Jombang untuk menyebut lembaga ini. Selama 32 tahun bank tersebut beroperasi mengalami beberapa pergantian nama bank.

¹⁴ *Jaarverslag Djombangsche Hulp-, Spaar- en Landbouwcredietbank* tahun 1908 no. catalog HB.9 no.box 5.12 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

¹⁵ Kredit pertanian adalah pinjaman yang diberikan kepada petani untuk biaya pada masa tanam seperti membeli bibit padi, pupuk dan peralatan pertanian. Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di masa Depresi*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 39.

yang seringkali menjerat para pegawai pemerintah kabupaten (*ambtenar*) dan petani dengan bunga yang tinggi.¹⁶

Bank Kredit Rakyat Jombang ini juga memberikan kredit golongan menengah (*middenstandcrediet*) sebagai bagian aktivitas pemberian kreditnya. Kredit ini ditujukan kepada golongan pegawai pemerintahan, kaum pensiunan dan pengusaha swasta (*particulier*).¹⁷ Pemberian kredit kepada pengusaha pemilik Pabrik Gula di Jombang juga dilakukan oleh Bank Kredit Rakyat Jombang untuk menambah modal usaha pengolahan tebu tersebut.¹⁸

Eksistensi Bank Kredit Rakyat Jombang awalnya hanya di kalangan pegawai pribumi pemerintah kabupaten dan pengusaha (pemilik pabrik gula) dari golongan Eropa. Hal ini terjadi karena beberapa pejabat kabupaten (*pangreh praja*) juga merupakan pengurus dari bank kredit ini seperti Bupati dan Wedono. Di pihak lain, pengusaha/pemilik pabrik gula membutuhkan bank untuk menyimpan uang dan untuk mendapatkan pinjaman uang seperti yang dilakukan oleh J. van Deun (pemilik SF. Ngelom).¹⁹

Berbeda dengan kedua golongan masyarakat di atas, golongan masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa di Jombang kurang familiar terhadap bank

¹⁶ Margono Djojohadikusumo, *Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman: salah satu kisah keluarga*, (Jakarta: Indira, tanpa tahun), hlm. 57.

¹⁷ Sumitro Djojohadikusumo, *op. cit.*, hlm.40.

¹⁸ Beberapa pabrik gula yang pernah beroperasi di Jombang adalah SF. Ngelom (sejak tahun 1889 di daerah Ploso), SF. Ponen, SF. Peterongan, SF. Tjoekir (Tebu Ireng), SF. Djombang, SF. Modjoagoeng, SF. Soemobito, SF. Seloredjo dan SF. Tjeweng. "Jombang ver. Prins Bernhard-en Spitfire-Fondsen" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 16 Mei 1941.

¹⁹ Lampiran IV. "ondernemingen op den grondslag van overeenkomsten met de bevolking" dalam *Publicatie van Departement van Binnenlandsh Bestuur tahun 1914*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1915), hlm. 218.

dikarenakan kurangnya pemahaman dan pendidikan. Hal itu membuat keduanya belum terbiasa untuk melakukan kegiatan simpan, pinjam dan kredit pertanian di bank.²⁰ Masyarakat pribumi lebih dekat dengan sistem peminjaman yang bersifat tradisional.

Berbeda dengan daerah lain di Jombang, masyarakat pribumi di desa Mojowarno Jombang telah lebih dahulu mengenal lembaga bank. Sejak tahun 1888 di desa Mojowarno ini telah berdiri Bank Tabungan untuk Orang-orang Pribumi (*Spaarbank voor Inlanders*). Desa yang menjadi pusat penyebaran agama Kristen di Jombang ini, mendirikan Bank untuk Orang-orang Pribumi ini atas inisiatif seorang penyebar agama Kristen (*zending*) setempat yaitu Jellesma dan dibantu oleh H. E. Steinmetz yang saat itu menjabat sebagai asisten residen Jombang.²¹ Bank ini tidak banyak memiliki pengaruh besar ke masyarakat karena bersifat lokal tingkat desa dan memiliki modal yang relatif kecil.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Jombang umumnya memberikan respon positif terhadap keberadaan Bank Kredit Rakyat Jombang. Jumlah nasabah dari golongan Eropa dan Pribumi semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama pada aktivitas menabung dan berdeposito.²² Respon serupa juga ditunjukkan oleh kaum etnis Tionghoa Jombang, khususnya dari suku Hoakiau yang menggambarkan bank sebagai benteng dalam persaingan dagang dengan

²⁰ M.G. Sulistyawardhani, *Kredit Rakyat: Studi Pendahuluan pada Abad XX di Jawa* (Jogyakarta: Kalika, 2000), hlm.5.

²¹ Pandu Suharto, *op. cit.*, hlm.14.

²² Lampiran 4 *Jaarverslag Djombangsche Hulp- Spaar- en Landbouwcredietbank* tahun 1908 no. catalog HB.9 no.box 5.12 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

pedagang lain.²³ Hal ini menunjukkan peran dan manfaat besar yang diharapkan oleh masyarakat Tionghoa Hoakiau Jombang terhadap keberadaan Bank Kredit Rakyat Jombang.

Bank Jombang juga mengalami dinamika dalam kepengurusam bank dan aktivitas perbankan terutama pemberian kredit. Kepengurusan (manajemen pegawai) Bank Kredit Rakyat Jombang dipegang oleh orang Eropa dan juga orang pribumi dalam jabatan-jabatan yang telah ditentukan berdasarkan kelas sosial.²⁴ Orang Eropa dapat mengisi jabatan tertentu seperti: jabatan kepala bank, komisaris, administratur, sekretaris-bendahara dan anggota pengurus bank. Kelompok masyarakat pribumi yang menempati posisi pengurus Bank Kredit Rakyat Jombang adalah hanya dari kalangan terpandang seperti Bupati, Wedono dan Patih. Jabatan yang dapat ditempati oleh pribumi adalah jabatan wakil kepala bank, sekretaris-bendahara dan anggota pengurus bank.²⁵

Aktivitas perbankan dari Bank Kredit Rakyat Jombang ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat Jombang untuk menabung, berdeposito, peminjaman uang (kredit) dan simpanan dana pensiun (*pensioenfond*). Jumlah dari penabung dan penerima kredit dari Bank Kredit Rakyat Jombang selama 32 tahun

²³ “Bank dan Pegadean: kepentingan kita terhadap pada harta” dalam surat kabar *Tjahaja Jombang* 1926 (Koran: port.XXIX no.16. No.5 lembar kedua Juni 1926 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).

²⁴ Pada masa kolonial, masyarakat Hindia Belanda dibagi dalam tiga kelas sosial yaitu golongan masyarakat Eropa (*Europasche*) menempati kelas sosial pertama. Kelas sosial kedua ditempati oleh golongan masyarakat Timur Asing (*Vremde Oosterlingen*) dan kelas sosial ketiga ditempati oleh pribumi (*Inlanders*). Dalam hal birokrasi juga dibedakan dalam tiga kelas sosial tersebut. Materi kuliah tentang perkembangan birokrasi dalam kelas Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan oleh Muryadi di Ilmu Sejarah Universitas Airlangga.

²⁵ Diolah dari berbagai data kepengurusan bank dalam laporan tahunan (*Jaarverslag*) Bank Kredit Rakyat Jombang tahun 1908, 1910, 1911, 1921 dan 1931 no. catalog HB.9 no.box 5.12 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

mengalami fluktuasi.²⁶ Bank ini juga mengalami perubahan kebijakan dalam pemberian kredit dan penagihan uang ketika masa depresi ekonomi tahun 1929. Hal tersebut dilakukan oleh bank untuk meminimalkan kredit macet yang banyak terjadi pada masa yang sulit itu.²⁷

Pergantian nama Bank Kredit Rakyat Jombang terjadi beberapa kali. Salah satu alasan pergantian nama ini terjadi karena perubahan status daerah Jombang dari distrik menjadi kabupaten tersendiri yang lepas dari Kabupaten Mojokerto pada tahun 1910. Nama bank kembali berubah ketika bank semakin membuka diri untuk memberi pinjaman ke semua etnis masyarakat termasuk etnis Tionghoa yang dimulai sejak tahun 1920-an.²⁸

Dalam perkembangan dari lembaga Bank Kredit Rakyat Jombang terdapat beberapa kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank ini. Korupsi ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi bank. Kasus penggelapan dana bank yang paling terkenal adalah kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh K. L. Jacobs pada tahun 1926.²⁹

Munculnya Bank Kredit Rakyat Jombang sebagai lembaga yang pemberi pinjaman uang telah memberikan alternatif bagi masyarakat Jombang untuk mendapatkan uang selain meminjam kepada rentenir. Bank juga telah merubah

²⁶ Lampiran 9 *Jaarverslag vereeniging Volkscredietbank Djombang* tahun 1921 no. catalog HB.9 no.box 5.12 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

²⁷ M. G. Sulistyawardhani, *op. cit.*, hlm. 56-57.

²⁸ Pergantian nama Bank Kredit Rakyat Jombang: *Djombangsche Hulp-, Spaar- en Landbouwcredietbank* (1902-1909), *Djombangsche afdeeligsbank* (1910-1920), *Djombangsche bank* (1921-1930) dan *Volkscredietbank Djombang* (1931-1934).

²⁹ "Rechtzaken" dalam *De Indische Courant*, 9 Oktober 1926

kebiasaan masyarakat yang sebelumnya mempergunakan sistem pinjam meminjam tradisional (*ijon*) ke pinjam meminjam modern (bank). Sistem pembayaran yang awalnya kesepakatan pengembalian berdasarkan sistem bagi hasil berubah menjadi sistem bunga yang ditentukan oleh bank.³⁰ Seluruh dinamika yang dialami oleh Bank Kredit Rakyat Jombang baik ini menarik untuk dikaji lebih jauh terutama beberapa kasus korupsi di Bank Kredit Rakyat Jombang.

B. Rumusan Masalah

Studi tentang bank daerah (bank kredit rakyat) dalam kajian sejarah ekonomi belum banyak yang menulis. Kajian sejarah ekonomi di Indonesia, khususnya perbankan masih didominasi dengan sejarah yang bersifat nasional. Padahal perkembangan sejarah perbankan di tingkat lokal memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berhubungan erat dengan pasang surut perekonomian lokal.³¹ Kekhasan yang dimaksud adalah bank perkreditan lokal (kabupaten) yang dikaji secara utuh akan dapat melihat perkembangan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Berbagai masalah yang terjadi pada bank kredit di tingkat lokal juga pasti berbeda dengan permasalahan bank kredit di daerah lainnya (unik).

³⁰ Wasino, "Dari Pola bagi Hasil Menjadi Pembayaran Bunga; Perkembangan Kredit Rakyat di Pedesaan Surakarta Pada Awal Hingga Pertengahan Abad ke-20" dalam J. Thomas Lindblad dan Bambang Purwanto (Ed), *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia: Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 279.

³¹ Bambang Purwanto, "Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia" dalam Sri Margana dan Widya Firrianiingsih, *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 502.

Kajian ini dikhususkan untuk menelaah aktifitas Bank Kredit Rakyat Jombang dan berbagai masalah yang terjadi pada bank ini sejak berdirinya pada tahun 1902 hingga akhirnya ditutup pada tahun 1934. Rumusan masalah yang diajukan penulis untuk mengkaji lembaga perbankan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses berdirinya Bank Kredit Rakyat Jombang?
- b. Bagaimana dinamika manajemen dan aktifitas perbankan Bank Kredit Rakyat Jombang di tahun 1902-1934?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Setiap penulisan sejarah memiliki tujuan mencari suatu kebenaran atas peristiwa masa lampau berdasarkan bukti sumber yang terpercaya. Tujuan utama penulisan ini untuk merekonstruksi kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jombang dalam bentuk tulisan deskriptif-analitis. Tujuan utama ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, penulisan ini berusaha untuk menjelaskan proses berdirinya Bank Kredit Rakyat Jombang sebagai lembaga perkreditan pertama di wilayah Karesidenan Surabaya.

Kedua, penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan perubahan-perubahan yang terjadi pada manajemen dan aktivitas perbankan Bank Kredit Rakyat Jombang selama kurun waktu 1902-1934. Aktivitas Bank Kredit Rakyat Jombang tersebut sedikit banyak berpengaruh kepada masyarakat Jombang.

Manfaat bagi akademisi adalah menambah bahan kajian dalam upaya memahami perkonomian Kabupaten Jombang dalam suatu lembaga perkreditan yaitu Bank Kredit Rakyat Jombang yang beroperasi pada tahun 1902-1934.

Bagi masyarakat umum adalah menambah pengetahuan sejarah ekonomi dari Kabupaten Jombang dalam periode akhir kolonial. Bank Jombang ini menjadi salah satu fasilitas keuangan modern pada awal abad ke-20 di wilayah ini. Bank Kredit Rakyat Jombang yang berdiri sejak tahun 1902 hingga tahun 1934 telah membantu masyarakat Jombang untuk memperoleh pinjaman uang dan jasa keuangan lainnya.

D. Ruang Lingkup

Skripsi dengan judul “Bank Kredit Rakyat Jombang tahun 1902-1934” ini membatasi diri dalam suatu ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan kajian ini meliputi: proses berdirinya Bank Kredit Rakyat Jombang, aktivitas bank seperti pemberian kredit, perubahan manajemen kepegawaian, sistem peminjaman yang dipergunakan selama beroperasi dan pengaruh bank kepada masyarakat Jombang.

Pembatasan wajib dalam setiap studi ilmu sejarah adalah pembatasan temporal (waktu) dan spasial (tempat). Unsur temporal penting dalam membentuk kerangka pemikiran tentang periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah menurut *Kuntowijoyo* adalah semata konsep berfikir dari sejarawan untuk mempermudah alur runtut peristiwa (kronologi) dan membantu dalam memahami sebab-akibat dari suatu peristiwa sejarah. Berdasarkan laporan tahunan tahun 1908, diketahui tahun berdiri Bank Jombang adalah 1902. Hal ini didukung oleh pernyataan

Sumitro Djojohadikusumo bahwa munculnya bank daerah (bank kredit rakyat) ini sekitar tahun 1900-an.³²

Batasan akhir dari tulisan ini adalah tahun 1934, pada tahun ini Bank Kredit Rakyat Jombang harus digantikan dengan bentuk Bank Kredit Rakyat Umum atau *Algemenee Volkscredietbank*. Hal ini atas keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 19 Februari 1934 no. 20 dan *Staatsblad* no. 82 tahun 1934 yang menyatakan bahwa terdapat pembentukan *Algemenee Volkscredietbank* (AVB) yang menggantikan posisi bank daerah. Modal lembaga *Algemenee Volkscredietbank* terpusat pada *Centrale Kas* yang berada di Batavia.³³ Salah satu sebab digantikannya adalah karena dampak depresi ekonomi dunia tahun 1929-1930 yang mengakibatkan banyaknya kasus kredit macet pada banyak bank di Hindia Belanda. Kondisi yang tidak menguntungkan ini membuat banyak bank daerah akhirnya dibubarkan.³⁴

Jombang dipilih sebagai kawasan spasial tulisan ini dikarenakan Kabupaten Jombang memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian di Jawa Timur pada masa kolonial. Jombang adalah salah satu daerah perkebunan tebu yang subur dan pengekspor gula yang dikirim ke luar negeri melalui pelabuhan di Surabaya.³⁵ Sebagai salah satu kabupaten yang menjadi pusat kegiatan ekonomi orang Eropa di Karesidenan Surabaya, maka didirikanlah Bank Kredit Rakyat

³² Sumitro Djojohadikusumo, *op. cit.*, hlm. 39.

³³ *Ibid.*, hlm. 155.

³⁴ “Volkscredietbank: Reeds 35 Afdeelingsbanken Ontbonden” dalam *Bataviasche Nieuwsblad*, 22 Maret 1934.

³⁵ Nasution. *op. cit.*, hlm. 3.

sebagai pemberi kredit kepada masyarakat Jombang. Bank Kredit Rakyat Jombang juga merupakan bank kredit rakyat yang pertama kali didirikan di wilayah Karesidenan Surabaya

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, buku yang ditulis oleh Pandu Suharto yaitu Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Buku ini mengungkapkan proses berdirinya bank priyayi, bank perkreditan, bank pasar, bank desa dan lumbung desa. Pandu Suharto menjelaskan secara rinci berbagai lembaga perkreditan yang hadir di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Informasi tentang perkembangan lembaga perkreditan yang ada di Hindia Belanda hingga ke tahap pengawasan lembaga kredit menjadi hal yang dapat menjadi menarik dalam kajian perbankan kolonial. Buku ini mengungkapkan pula sekilas tentang lembaga Lumbung Miskin di Mojowarno dan tahun pendirian Bank Kredit Rakyat Jombang.

Kedua, buku yang juga mencoba mengungkap tentang sejarah awal berdirinya lembaga bank perkreditan pada masa kolonial adalah Kredit Rakyat Suatu Studi Pendahuluan Pada Awal Abad XX di Jawa karya M. G. Sulistyawardhani. Buku ini berisi informasi perkembangan Bank Kredit Rakyat di Jawa, dengan menekankan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga perkreditan seperti rentenir, kredit macet, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga bank desa dan lumbung desa di Jawa. Karya ini memberikan informasi kepada penulis

tentang sistem pemberian pinjaman yang diterapkan Bank Kredit Rakyat Jombang ketika depresi ekonomi yaitu sistem langganan tetap.

Ketiga, buku dengan judul Kredit Rakyat di Masa Depresi karya Sumitro Djojohadikusumo adalah buku yang sangat rinci dalam menggambarkan tingginya kebutuhan kredit masyarakat di Hindia Belanda, khususnya pada masa sebelum dan sesudah depresi ekonomi tahun 1930. Perubahan-perubahan kebijakan dan kelembagaan bank perkreditan sebagai lembaga resmi pemerintah banyak dibahas dalam buku ini. Bagi penulis, buku ini dapat menjelaskan situasi dan penyebab ditutupnya bank kredit rakyat dan digantikannya menjadi AVB pada 1934.

Karya skripsi dari Jenfri Indranata dengan judul Lembaga Perkreditan pada Masa Kolonial: Studi Dinamika *Lamongansche Volkscredietbank* 1905-1933 membuka studi tentang lembaga perkreditan di daerah secara utuh. Karya ini mengulas tentang perubahan cara pinjam tradisional ke lembaga pemberi kredit modern (bank) dan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Bank Lamongan. Skripsi ini banyak membahas Bank Lamongan dari sisi aktifitas pemberian kredit kepada masyarakat. Permasalahan khusus yang ada di sekitar Bank Lamongan belum banyak dipaparkan.

Karya skripsi lainnya yang membahas tentang bank yaitu Bank Kabupaten Jombang Tahun 1908-1911 karya Diah Ayu Kurniatun Nikmah. Karya ini membahas objek yang sama dengan objek kajian penulis. Tulisan ini lebih banyak menyoroti perubahan di sisi dewan pengurus bank dan aktivitas yang dilakukan

bank selama 1908-1911.³⁶ Karya ini tidak mengkaji Bank Kredit Rakyat Jombang secara utuh dan mendalam karena hanya membatasi diri dalam periode yang sangat pendek (tiga tahun). Berbagai masalah seperti proses pendirian bank, kasus rentenir, korupsi pegawai dan kemunduran dari Bank Kredit Rakyat Jombang tidak dapat diungkapkan secara menyeluruh dan tuntas.

Penulis merasa perlu untuk mengajukan tema yang sama untuk diteliti kembali dan melengkapi menjadi tulisan sejarah yang lebih sempurna. Penulisan ini bertujuan dapat memotret Bank Kredit Rakyat Jombang sejak berdiri pada 1902 hingga dibubarkannya pada tahun 1934, masalah-masalah internal yang terjadi pada lembaga ini dan pengaruhnya kepada masyarakat Jombang.

Beberapa pustaka dan penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis mendapatkan beberapa informasi yang bersifat parsial tentang Bank Kredit Rakyat Jombang. Informasi tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan referensi untuk pencarian data dan sumber penulisan Bank Kredit Rakyat Jombang ini. Informasi yang sesuai digunakan untuk melengkapi pembahasan skripsi ini dengan tujuan mencari jawaban atas rumusan masalah yang penulis telah ajukan.

Penulis membedakan diri dari tulisan yang sudah ada baik dari segi perpektif pembahasan dan juga sub-bab yang lebih kompleks. Penulis berusaha menampilkan pembahasan tentang proses pendirian bank, kegiatan rentenir di Jombang dan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai Bank Kredit

³⁶ Skripsi Diah Ayu Kurniatun Nikmah ini didasarkan pada tiga laporan tahunan (*Jaarverslag*) Bank Kredit Rakyat Jombang di tahun 1908, 1910 dan 1911. Sumber koran dan foto sezaman tidak banyak menjadi acuan sumber penulisan.

Rakyat Jombang. Pembahasan-pembahasan tersebut, sejauh pengetahuan penulis belum pernah ditulis dalam karya akademis untuk pengajuan syarat kelulusan.

F. Kerangka Konseptual

Suatu studi sejarah dikatakan berhasil bila mencapai proses intersubjektif. Proses intersubjektif ialah proses ketika seorang penulis berhasil membuat pembaca memahami maksud dan informasi yang disajikan tulisan tersebut. Kerangka konseptual dan teori merupakan hal yang penting untuk mencapai proses tersebut. Studi ini menggunakan teori yang berhubungan dengan lembaga perbankan, perkreditan dan pendekatan masyarakat peralihan dari prakapitalis ke masyarakat kapitalis.

Menurut Boeke, masyarakat Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu: masyarakat kapitalis tinggi dan masyarakat tahap pra kapitalis. Masyarakat kapitalis tinggi memiliki ciri berupa kebutuhan tidak terbatas, uang sebagai pangkal kegiatan ekonomi masyarakat dan munculnya kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan. Di sisi lain, masyarakat tahap pra-kapitalis bercirikan pada ikatan sosial yang masih erat dengan kebutuhan yang masih terbatas. Kegiatan ekonomi masyarakat pra-kapitalis juga masih rendah karena tidak berorientasi pada pencarian laba (subsisten).³⁷ Terkait masalah perbankan, Boeke berpendapat bahwa lembaga perkreditan merupakan "*echte mooi-weer instellingen*" atau lembaga pada masa cuaca baik semata.³⁸ Bank dapat memberikan pinjaman ketika perekonomian sedang baik tetapi ketika terjadi krisis

³⁷ M. G. Sulistyawardhani, *op. cit.*, hlm. 11.

³⁸ Sumitro Djojohadikusumo, *op. cit.*, hlm. 158.

ekonomi, bank juga akan mengurangi kegiatan untuk meminjamkan uang kepada masyarakat.

Pengertian kata bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menampung akumulasi laba yang tak terpakai dan menyebarkannya untuk membiayai suatu produksi pihak lain dengan perjanjian bunga tertentu (kredit).³⁹ Tujuan dari bank adalah agar mendapatkan keuntungan dan menghindari permasalahan kredit macet, maka bank membutuhkan sistem pengendalian intern. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, cara dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan oleh manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.⁴⁰

Salah satu kegiatan sistem pengendalian intern adalah melakukan penilaian kepada nasabah. Bank menilai kepada calon peminjam dengan prinsip 5C: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Conditions of economic* (kondisi perekonomian).⁴¹ Prinsip 5C digunakan untuk menilai kemampuan nasabah untuk mengembalikan uang pinjamannya seperti: memiliki watak yang jujur, memiliki usaha atau pekerjaan tetap, memiliki barang yang dapat dijadikan jaminan peminjaman, dan menilai naik-turun

³⁹ Paul-Heinz Koesters, *Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia: Pemikiran-Pemikiran yang Mempengaruhi Kita*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 96.

⁴⁰ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: BP STIE YKPN, 2006), hlm.165.

⁴¹ Chalid H. Kaspani, dkk, Evaluasi Pengendalian Manajemen Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja (Studi Pada PD. BPR BANK JOMBANG), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 15 No. 2 Oktober 2014 Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

perekonomian di masyarakat. Kesalahan dalam menilai peminjam akan berdampak kerugian bank yang diakibatkan kredit macet.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo.⁴² Tahap pertama dari metode ini dimulai dengan pemilihan tema dan bidang utama tulisan. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan dan minat penulis terhadap bidang kajian sejarah ekonomi khususnya perbankan. Tahap selanjutnya adalah proses pencarian sumber (heuristik) yaitu penelusuran sumber primer, sekunder dan tersier baik data dokumen arsip, surat kabar dan majalah sezaman serta sumber lisan sebagai bahan utama penulisan sejarah.

Penulis melakukan proses pencarian sumber pada lembaga penyimpan data masa lampau yang terpercaya seperti: Perpustakaan Nasional (perpusnas), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Timur, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (Kantor Arsip Jagir) dan Perpustakaan Bank Indonesia (BI) Surabaya. Pencarian sumber surat kabar dan majalah sezaman banyak diperoleh dalam website www.delpher.nl, sedangkan sumber foto sezaman dapat diambil pada website www.kitlv.nl.

Tahap berikutnya adalah kritik terhadap sumber yang terkumpul dan kemudian diuji otensitasnya dari segi eksternal maupun internal. Kritik ini tidak hanya mengharuskan untuk mengimbangi sumber baik yang lisan maupun

⁴² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 89-105.

dokumen, tetapi juga mengharuskan adanya keseimbangan antara pendapat pro dan kontra yang ditemukan dalam informasi dari berbagai sumber tersebut.

Interpretasi merupakan suatu proses penafsiran atas berbagai sumber yang telah diperoleh. Interpretasi bertujuan merekonstruksi kejadian masa lampau berdasarkan berbagai sumber untuk selanjutnya dinarasikan semirip mungkin dengan kejadian di masa lalu. Proses interpretasi ini dipengaruhi juga oleh daya imajinasi peneliti dalam melihat berbagai rangkaian peristiwa masa lampau. Terakhir adalah historiografi yaitu proses kreativitas penulis untuk menyajikan hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan yang dapat dinikmati dan sesuai rambu aturan akademik.

Penulis menggunakan model penulisan deskriptif-interpretatif dalam proses penulisan skripsi ini. Model penulisan ini dapat menjelaskan unsur kausalitas atas peristiwa dan menjawab atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa peristiwa sejarah itu terjadi. Penulis mengharapkan dengan metode penelitian ilmu sejarah dan model penulisan deskriptif-analitis mampu mendeskripsikan dinamika Bank Kredit Rakyat Jombang tahun 1902-1934 dengan baik dan benar.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk membentuk suatu kerangka pemikiran yang sistematis guna untuk mempermudah dalam proses penulisan sesuai urutan peristiwa dan periodisasi. Sistematika penulisan juga berfungsi mengontrol tulisan bagi penulis dan membantu pembaca untuk memahami

maksud serta alur penulisan kajian ini. Penulis mengajukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Pada bab II, penjelasan dimulai dengan kondisi perekonomian Kabupaten Jombang menjelang abad ke-20. Kemudian, terdapat sub-bab tentang Lumbung Miskin di Mojowarno sebagai lembaga pemberi pinjaman skala lokal Desa Mojowarno. Uraian dilanjutkan tentang proses berdiri Bank Kredit Rakyat Jombang sebagai suatu lembaga keuangan resmi yang memberikan kredit kepada masyarakat Jombang pada awal abad ke-20. Kegiatan para rentenir atau pelepas uang sebagai musuh dari lembaga perkreditan dan lembaga lumbung miskin di Jombang juga dibahas di bab ini.

Pada bab III, dipaparkan dinamika terjadi pada Bank Kredit Rakyat Jombang antara tahun 1902-1934. Perubahan yang jelas terjadi di Bank Kredit Rakyat Jombang adalah pergantian nama bank, perubahan manajemen kepegawaian dan pejabat Bank Kredit Rakyat Jombang. Bab ini juga membahas Sistem Langganan Tetap yang diterapkan oleh Bank Kredit Rakyat Jombang terutama pada masa depresi ekonomi. Masalah intern yang terjadi di dalam Bank Kredit Rakyat Jombang seperti: korupsi pegawai Bank Kredit Rakyat Jombang, kebijakan bank dalam memberikan kompensasi (gaji) pegawai dan perubahan nama bank akan dibahas dalam bab ini.

Pada bab IV ini, akan dijelaskan mengenai aktivitas perbankan Bank Kredit Rakyat Jombang yang berupa perubahan sumber dana bank seperti: modal pokok (kas), tabungan dan deposito. Beban usaha yang berupa gaji pegawai, pemberian kredit dan permasalahan kredit macet yang dialami bank dijelaskan dalam bab ini. Sub-bab terakhir dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai masa kemunduran Bank Kredit Rakyat akibat depresi ekonomi tahun 1929 dan pengaruh dari keberadaan Bank Kredit Rakyat Jombang kepada masyarakat Jombang.

Pada bab V ini akan memberikan gambaran hasil dari penelitian yang berupa simpulan. Simpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis pada rumusan masalah. Dilanjutkan dengan hal yang belum terangkum dalam pembahasan penelitian ini akan dicantumkan dalam saran. Setelah bab simpulan ini terdapat daftar pustaka yang merupakan kumpulan sumber yang digunakan selama penelitian ini dan berbagai lampiran terutama arsip yang mendukung penulisan ini.